

Dinamika Stabilitas Politik Di Indonesia Ditinjau Dari Pemikiran Politik Kekuasaan Nicholas Machiavelli

Ahmad Fatih Syarofuzzaman^{*1} , Rizal Al-hamid² 

^{1,2} Sunan Kalijaga State Islamic University Yogyakarta, Yogyakarta, 55281, Indonesia

*Corresponding Author: ahmadfatichsz@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received 13 April 2023

Revised 20 November 2023

Accepted 22 January 2024

Available 31 January 2024

E-ISSN: 0216-9290

How to cite:

Syarofuzzaman, A. F. & Al-Hamid, R. (2024). Dinamika Stabilitas Politik di Indonesia Ditinjau dari Pemikiran Politik Kekuasaan Nicholas Machiavelli. POLITEIA: Jurnal Ilmu Politik. LingPoet: Journal of Linguistics and Literary Research, 1(1), 26-30.

ABSTRACT

Political competition in a power is a necessity that always occurs. The relationship between politics and power are two closely related entities. The concept of power is a widely discussed study in politics. One of the renaissance political thinkers who also paid attention to the theory of power was Nicholas Machiavelli. He is a modern philosopher who is quite famous for his political philosophy thoughts. The politics of power offered by Machiavelli asserts that a ruler must have a strategy to seize or maintain power by any means, even if the action contradicts the context of morality. In other words, Machiavelli wanted the goal to justify all means for the sake of power. Actions that justify all means in the context of power politics will have an impact on the potential to cause new problems in society. Especially when faced with political stability. The concept of power that he offers provides a model of understanding that Machiavelli brings political discussion to a realistic order. However, a ruler must always pay attention to the interests of the people, not personal or group interests. This research uses a literature study research method. This article tries to analyze Machiavelli's power politics as a lens to see the dynamics of political stability in Indonesia.

Keyword: Political stability, power, Nicholas Machiavelli

ABSTRAK

Percaturan politik dalam suatu kekuasaan merupakan suatu keniscayaan yang selalu terjadi. Hubungan antara politik dan kekuasaan merupakan dua entitas yang sangat berkaitan erat. Konsep tentang kekuasaan menjadi kajian yang banyak dibahas dalam politik. Salah satu pemikir politik zaman renaissance yang juga menaruh perhatiannya pada teori kekuasaan adalah Nicholas Machiavelli. Ia merupakan filsuf abad modern yang cukup terkenal dengan pemikiran filsafat politiknya. Politik kekuasaan yang ditawarkan oleh Machiavelli menegaskan bahwa seorang penguasa harus memiliki strategi untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan dengan cara apapun, meskipun tindakan itu berkontradiksi dengan konteks moralitas. Dengan kata lain, Machiavelli menghendaki tujuan untuk menghalalkan segala cara demi kekuasaan. Tindakan yang menghalalkan segala cara dalam konteks politik kekuasaan akan berdampak pada potensi yang dapat menimbulkan persoalan-persoalan baru dalam masyarakat. Terlebih jika dihadapkan pada stabilitas politik. Konsep kekuasaan yang ia tawarkan memberikan suatu model pemahaman bahwa Machiavelli membawa diskusi politik pada tatanan yang bersifat realistik. Meskipun demikian, seorang penguasa harus selalu memperhatikan kepentingan rakyat bukan kepentingan pribadi maupun suatu golongan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi pustaka. Tulisan ini mencoba untuk menganalisis pemikiran politik kekuasaan Machiavelli sebagaiacamata untuk melihat dinamika stabilitas politik di Indonesia.

Keyword: Stabilitas politik, kekuasaan, Nicholas Machiavelli



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.

<http://doi.org/10.26594/register.v6i1.idarticle>

1. Pendahuluan

Percaturan politik dalam suatu kekuasaan merupakan suatu keniscayaan yang selalu terjadi. Berbagai bentuk tujuan dan dinamika politik menjadi pembahasan yang begitu penting untuk dijadikan suatu kajian. Terlebih lagi akan terjadi ajang kontestasi politik terbesar di Indonesia, yaitu pemilihan legislatif dan pilpres 2024. Hal ini sudah mulai terlihat dari sistem algoritma berbagai media massa dan media sosial di Indonesia yang mulai beralih dari suasana pandemi Covid-19 ke topik-topik politik. Nampaknya, topik-topik tentang politik ini akan terus mendominasi dan berseliweran di media sosial pada tahun ini.

Berbagai konten-konten dan informasi tentang politik yang ditampilkan oleh media massa terkadang dapat menimbulkan pengaruh terhadap dinamika stabilitas politik. Salah satu contohnya adalah ketika portal berita menampilkan *headline* judul yang terkadang *clickbait* atau cenderung dilebih-lebihkan. Bahkan ironisnya terdapat beberapa media yang secara tendensius disinyalir memiliki keberpihakan pada pihak-pihak tertentu. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi panggung politik terkini di Indonesia menjadi isu yang sensitif, sehingga akan menyebabkan dinamika stabilitas politik semakin naik tensinya.

Berbicara tentang stabilitas politik hal ini dapat dipahami sebagai suatu kondisi yang tidak ada pergesekan dalam tatanan suatu sistem politik (pemerintah) atau tidak adanya revolusi pada batas-batas yang telah ditentukan (Riggs, 1994). Menurut Arbi Sanit secara teoritis, stabilitas politik ditentukan oleh tiga variabel yang saling berkaitan, yaitu perkembangan ekonomi yang memadai, perkembangan kelembagaan baik struktur maupun proses politik dan partisipasi politik. Perkembangan ekonomi meliputi adanya tingkat pertumbuhan yang cukup dalam masyarakat. Sedangkan kelembagaan politik mengarah pada pengertian tidak timbulnya konflik antara kekuatan-kekuatan politik. Dan partisipasi politik lebih mengacu pada konsep partisipasi menurut pola pemerintahan dimana bentuk partisipasi lebih bersifat *mobilized* (Sanit, 1982).

Fakta yang terjadi belakangan ini adalah maraknya aktivitas pendengung (*buzzer*) dalam kontestasi politik di Indonesia. Dalam hal ini, para *buzzer* tersebut dikendalikan oleh elit-elit politik yang menggunakan jasanya dengan tujuan untuk kepentingan politik kekuasaan, baik dengan cara membangun citra positif atau bahkan merusak citra lawan politiknya. Mereka bergerak secara masif melalui akun-akun palsu. Narasi yang digunakan berputar pada isu-isu agama dan politik identitas. Seperti yang telah terjadi pada pilkada DKI Jakarta 2017 dan pilpres 2019, yang berakibat pada terciptanya polarisasi masyarakat, dan tentu berpengaruh pada dinamika stabilitas politik di Indonesia (Anugerah, 2021).

Berdasarkan fakta di atas, timbulnya eskalasi konflik yang terjadi dalam dunia politik bergantung pada konsep kekuasaan. Dengan kata lain, segala cara dan kepentingan untuk meraih kekuasaan selalu menentukan arah stabilitas politik. Hal demikian sudah lumrah terjadi, demi meraih dan merebut kekuasaan.

Pada dasarnya, politik memiliki keterkaitan dengan legitimasi kekuasaan, karena politik merupakan bukti empiris sekaligus alat untuk memperoleh kekuasaan. Konsep tentang kekuasaan menjadi kajian yang banyak dibahas dalam politik. Hal ini disebabkan karena konsep kekuasaan sangat krusial dalam ilmu sosial pada umumnya, dan dalam ilmu politik pada khususnya. Tidak heran jika ada yang beranggapan bahwa politik identik dengan kekuasaan (Budiardjo, 2008).

Konsep tentang kekuasaan sudah menjadi tema sentral sejak zaman Yunani kuno. Diskursus tentang kekuasaan sejak zaman filsuf Yunani seringkali dikaitkan dengan konsep kebaikan, keadilan serta kebebasan. Berbeda pandangan dengan filsuf Yunani, para tokoh pemikir religius mengkorelasikan konsep kekuasaan pada aspek ketuhanan. Menurut mereka, kekuasaan politik tidak boleh keluar dari koridor nilai-nilai yang berlandaskan kehendak Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Kekuasaan dalam politik tidak lain hanya dijadikan sebagai alat untuk mengabdikan dengan tujuan mencapai negara ideal. Maka dari itu, konsep kekuasaan tidak boleh terpisah dari aspek-aspek kebaikan, keadilan, kebijaksanaan dan nilai-nilai ketuhanan. Dengan kata lain, konsep kekuasaan harus dibangun dari unsur moralitas dan agama (Rapar, 1991).

Selain para filsuf Yunani kuno, salah satu pemikir politik zaman renaissance yang juga menaruh perhatiannya pada teori kekuasaan adalah Nicholas Machiavelli. Ia merupakan filsuf abad modern yang cukup terkenal dengan pemikiran filsafat politiknya. Pemikiran kekuasaan yang ditawarkan oleh Machiavelli berbeda dengan pandangan para filsuf klasik. Machiavelli menekankan bahwa kekuasaan harus ditempuh demi kepentingan negara dan harus dipisah dari unsur moralitas dan agama. Dalam hal ini, seringkali pemikiran Machiavelli dianggap bersifat kontroversial. Sehingga kebanyakan orang memandang negatif ketika berbicara tentangnya. Stigma negatif yang dilekatkan pada Machiavelli disebabkan karena teorinya tentang kekuasaan seringkali diasosiasikan dengan ajaran kediktatoran (Fahrezy & Al Hamid, 2021).

Gagasan Machiavelli tentang konsep kekuasaan tidak lepas dari *magnum opus*nya yang berjudul *Il Principe* (Sang Penguasa). Politik kekuasaan yang ditawarkan oleh Machiavelli menegaskan bahwa seorang penguasa harus memiliki strategi untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan dengan cara apapun, meskipun itu merupakan tindakan yang amoral. Untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan, manusia akan menghalalkan segala cara meskipun harus menyakiti manusia lainnya. Artinya, hubungan antara manusia

dan politik merupakan dua macam figur yang sangat esensial. Seperti yang telah umum diketahui dari filsuf Yunani kuno, Aristoteles mengatakan bahwa “Manusia pada hakikatnya adalah binatang politik”.

Berdasarkan kajian di atas, terdapat beberapa penelitian sebelumnya terkait dengan konsep politik kekuasaan Machiavelli. Menurut Qomariyah, gagasan kekuasaan Machiavelli tidak lebih dari upaya mempertahankan kekuasaan, baik itu dengan sifat kemanusiaan atau sifat kehevanan secara bersamaan (Qomariyah, 2023). Pada penelitian lainnya, Atthahara mengungkapkan bahwa pemikiran Machiavelli dalam meraih kekuasaan meskipun bertentangan dengan moral, seperti memainkan isu agama dapat dibenarkan. Cara tersebut terbukti sudah terlihat pada konteks pilpres 2019, dimana kedua pasangan menggunakan isu agama demi menggapai kekuasaan (Atthahara, 2020).

Sebagaimana penjelasan di atas, menurut hemat penulis bahwa pemikiran politik kekuasaan Machiavelli menarik untuk dikaji secara komprehensif. Terlebih jika dihadapkan pada stabilitas politik di Indonesia, baik itu yang telah terjadi atau akan terjadi di masa mendatang. Tidak heran jika Machiavelli sering dianggap sebagai pemikir yang teorinya sangat kontroversial.

Maka tujuan dari penelitian ini akan mencoba mengulas dan menganalisis konsep politik kekuasaan Machiavelli sebagai sudut pandang untuk melihat kasus-kasus politik yang berimplikasi terhadap dinamika stabilitas politik di Indonesia. Termasuk dalam sedikit bagian dari tulisan ini juga akan menyinggung pemikiran Machiavelli tentang karakteristik dan sikap apa saja yang harus dimiliki oleh seorang penguasa dalam politik kekuasaannya.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode studi pustaka (*Library Research*), yaitu penelitian yang dalam proses pengumpulan data dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, artikel jurnal ilmiah dan berbagai referensi lainnya. Dalam konteks penelitian ini, penulis mengklasifikasikan data menjadi data primer dan data sekunder. Sumber data primer yang digunakan berupa buku karya Machiavelli yang berjudul *The Prince*. Sementara data sekunder berupa buku-buku pendukung, antara lain seperti “Filsafat Politik Machiavelli”; “Pemikiran Politik Barat”, dan artikel jurnal ilmiah yang masih berkaitan dengan topik penelitian, di antaranya adalah “Perspektif Ideologi dan Kekuasaan (Telaah Historis Pemikiran Niccolo Machiavelli)”; “Pemikiran Politik Niccolo Machiavelli: Studi Kasus Dinasti Umayyah”. Dari sumber data yang telah dikumpulkan, kemudian harus dianalisis terlebih dahulu.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan cara menggambarkan data-data yang telah diperoleh. Setelah itu, data tersebut dianalisis untuk mencari hubungan antara satu dengan lainnya dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang luas dan mendalam terhadap hasil penelitian. Dalam konteks penelitian ini, penulis akan menganalisis pemikiran politik kekuasaan Machiavelli sebagai suatu teori untuk memahami berbagai kasus-kasus politik yang berdampak pada dinamika stabilitas politik di Indonesia.

3. Hasil dan Pembahasan

Biografi Nicholas Machiavelli

Bernama lengkap Niccolo Machiavelli lahir di Florence, Italia pada Tahun 1469 dari pasangan suami istri yang bernama Bernardo Machiavelli dan Bartolomea. Ayah Niccolo Macheavelli adalah seorang pengacara kaya dari Italia sehingga dapat dikatakan bahwa Niccolo Machiavelli berasal dari latar belakang keluarga berada, meskipun seringkali dalam ungunannya dia mengaku hidup dalam kemiskinan. Keluarga Niccolo Machiavelli dapat disebut sebagai keluarga bangsawan, gelar ini dia peroleh melalui jalur ayahnya yang merupakan masih keturunan menengah-ningrat dari Oltrano, sebuah Distrik di Florence.

Filsuf ini hidup dalam zaman renaissance yang merupakan masa transisi dalam sejarah Barat antara abad pertengahan dengan abad modern. Istilah *renaisans* merupakan bahasa Prancis yang dalam bahasa latin disebut *re + nasci* yang bermakna lahir (*rebirth*). Para sejarawan menggunakan istilah ini untuk zaman kebangkitan intelektual dan runtuhnya otoritas gereja khususnya yang terjadi di Eropa, dan terlebih lagi di Italia sepanjang abad ke 15 dan 16 (Azhar, 2016). Meskipun tidak melahirkan filsuf teoritis penting, renaissance melahirkan salah satu manusia besar dalam kancah filsafat politik, yakni Niccolo Machiavelli. Adat-istiadatlah yang dibuatnya terkejut dan memang dia kadang-kadang mengejutkan. Tetapi banyak orang lain yang juga merasa terkejut seolah-olah mereka baru terbebas dari penipuan. Karakter filsafat politiknya bersifat ilmiah dan empiris, yang berdasarkan pada pengalaman kehidupannya sendiri, dan berbicara tentang cara untuk meraih tujuan tertentu, terlepas apakah itu baik atau buruk (B. Russel, 2002)

Dia dikenal publik sebagai tokoh politik dan tokoh filsafat. Karier politiknya bisa dibilang cukup bagus karena disamping menjadi seorang diplomat dia juga dipercaya sebagai penasihat dan pengamat seorang seorang penguasa Italia, Paus Julius II ketika berhadapan dengan bangsawan tinggi kota Valentino, Caesar

Borgia yang dikenal sebagai pemimpin yang ambisius dan gila kekuasaan. Akan tetapi, akhirnya, karier Niccolo Macheavelli ini hancur ketika keluarga Medici naik tahta, sehingga Niccolo Macheavelli dimusuhi dan dijebloskan ke penjara selama setahun meskipun ujungnya nanti dibebaskan karena dia dapat meyakinkan Medici bahwa dia tak bersalah. Berawal setelah bebasnya dipenjara, karya legendarisnya dimulai, setelah bebas, dia mulai merenungkan dan mengamati hasil dari pengalaman panjangnya dalam meniti karier dalam dunia politik dan pemerintahan dengan cara mengasingkan diri ke pinggir kota dan mulai menuliskan pikirannya. Sehingga pada akhirnya muncullah beberapa buku dan salah satunya yang paling fundamental adalah berjudul *Il Principe* (Sang Pangeran terbit 1532) dan *Discorsi sopra la prima decade di Tito Livio* (Diskursus tentang sepuluh buku pertama dari Titus Livius terbit 1531) (Hardiman, 2011).

Politik Kekuasaan Machiavelli

Kekuasaan memang sesuatu yang sangat ajaib seseorang yang sedang menggenggam kekuasaan biasanya menjadi tokoh yang disegani, dihormati, ditakuti, dan tidak jarang pula dibenci dan dicaci maki. Namun selama kekuasaan itu masih melekat kuat pada diri seseorang, orang tersebut punya kedigdayaan untuk berbuat banyak hal. Ia dapat memaksa orang lain untuk menyatakan ketundukan dan kadang-kadang kepasrahan (Rais, 1999).

Menurut Suhelmi, konsep kekuasaan Machiavelli yang menjadikannya sebagai pemikir politik yang cukup terkenal sedikitnya disebabkan oleh dua alasan. Pertama, pemikirannya telah menjadi sumber rujukan yang selalu digunakan oleh banyak penguasa di dunia, baik itu secara sembunyi-sembunyi atau terus terang menyatakan telah mempraktikkan gagasan-gagasan Machiavelli dari berbagai karyanya untuk tujuan politik kekuasaannya, misalnya Hitler dan Mussolini. Kedua, dari perspektif sejarah pemikiran politik, gagasannya menjadi titik pembeda paradigma politik antara abad pertengahan dan modern, suatu ciri penting dari abad renaisans. Perbedaan tersebut terletak pada posisi dimana para tokoh abad pertengahan seperti S. Augustinus dan Thomas Aquinas mengkonsepsikan politik kekuasaan dan konsep negara harus sejalan dengan aspek nilai-nilai agama dan Tuhan. Sementara Machiavelli berbeda pandangan bahwa kekuasaan harus terpisah dari peran agama dan Tuhan (Suhelmi, 2002).

Dalam konsep pemikiran Machiavelli, kekuasaan harus bertumpu pada pengalaman manusia. Kekuasaan merupakan entitas yang independen dan terlepas dari otoritas nilai-nilai moral. Kekuasaan bukan merupakan alat untuk mengabdikan pada kebaikan, keadilan dan kebebasan dari Tuhan melainkan kekuasaan adalah alat untuk mengabdikan pada kepentingan negara. Machiavelli memandang bahwa kekuasaan semata-mata untuk kesejahteraan negara dan mempertahankan kemerdekaan (Rapar, 2001). Machiavelli juga menekankan bahwa seorang penguasa dalam bertindak tidak harus bersifat dalam batasan idealisme atau bertindak pada apa yang seharusnya dilakukan melainkan lebih jauh Machiavelli mengajarkan bahwa beginilah realitas politik sesungguhnya, artinya dapat dikatakan bahwa politik itu bersifat politik-realistis (Dannis, 1986).

Konsep kekuasaan Machiavelli di atas memberikan suatu pandangan bahwa orientasi dunia politik yang sebelumnya hanya berkisar pada “apa yang seharusnya ada”, hendaknya harus beralih pada “apa yang ada”. Formula yang diberikan oleh Machiavelli ini menjadikan pemikirannya banyak dianut oleh penguasa-penguasa besar dunia, karena praktis dan tidak terlalu teoritis sehingga merupakan hal yang mudah untuk diimplementasikan. Dalam hal ini, konsekuensi yang dihasilkan dari praktik konsep kekuasaan Machiavelli yang dipandang sebagai konsep menimbulkan suatu pertanyaan: Apakah seorang penguasa lebih baik dicintai dari pada ditakuti atau sebaliknya? Apakah seorang penguasa harus bersikap kejam atau penuh belas kasih?

Menjawab pertanyaan di atas, Machiavelli dalam *The Prince* menyatakan bahwa pada dasarnya semua orang tentu menginginkan keduanya, baik sikap dicintai atau ditakuti. Untuk mempertemukan keduanya merupakan suatu hal yang sulit, maka menjadi orang yang ditakuti jauh lebih baik dari pada dicintai (Machiavelli, 2019). Machiavelli dalam memberikan pilihan tersebut berangkat dari suatu alasan bahwa seorang penguasa hendaknya membuat dirinya ditakuti sedemikian rupa, meskipun harus melakukan kebijakan yang bersikap kejam selama kebijakan tersebut dapat mempertahankan stabilitas politik. Seorang penguasa yang hanya mengandalkan sikap agar dicintai sepenuhnya oleh rakyatnya pasti akan hancur jika tidak diimbangi oleh sikap agar ditakuti, karena ikatan cinta merupakan ikatan yang mudah hancur. Berbeda dengan rasa takut yang selalu diotoritaskan pada ketakutan akan hukuman. Sikap agar ditakuti disini setidaknya tidak dibenci. Dalam hal ini, pemikiran Machiavelli tentang sikap ideal yang harus dimiliki oleh seorang penguasa seperti yang disinggung diatas berpijak pada seorang penguasa bernama Cesare Borgia yang selalu ia sebutkan dalam bukunya *The Prince*. Tokoh bernama Cesare Borgia merupakan politisi yang populer sebagai orang kejam, akan tetapi karakter kekejamannya itu menjadikan kerajaan Romagna lebih baik, kondusif dan aman. Oleh karena itu, seorang penguasa tidak perlu menghiraukan atas penilaian orang lain disebabkan kekejamannya, selama itu masih dengan tujuan mempersatukan rakyatnya.

Macam-macam Kekuasaan

Beberapa orang mungkin tidak menyukai motif kekuasaan yang berjalan di atas pemaksaan, ketidaksetaraan, dan terkadang kebrutalan. Beberapa pembicara mencela tentang “politik kekuasaan”, menyarankan agar pemerintahan berjalan tanpa kekuasaan, hubungan antara perorangan berjalan di atas dasar rasa berbagi dan cinta. Hal tersebut diupayakan karena sistem pemerintahan yang berjalan atas dasar demikian tidak akan bertahan lama. Jika hal demikian bertahan lama, mereka mensiasatinya dengan cara mengubah diri mereka menjadi struktur pemimpin dan pengikut konvensional. Sehingga bentuk kekuasaan yang terbangun didalamnya tidak lebih berdasarkan pada asas kepatuhan yang terlihat seperti kekuasaan (Roskin, 2017).

Seperti yang umum diketahui, bahwa konsep kekuasaan yang dibangun oleh Machiavelli dianggap sangat amoral, tidak mengindahkan unsur moralitas, mengambil jarak dari perspektif religius dan hanya sebagai upaya untuk menjustifikasi sikap kekejaman, atau perilaku kekerasan dalam politik (*political violence*). Bahkan Ernst Cassirer menganggap ia sebagai *Galileo of politics*, dengan semangat yang sama (Cassirer, 1946). Meskipun demikian, pemikiran Machiavelli tentang kekuasaan dalam *The Prince* tidak hanya terbatas pada unsur kekejaman saja, akan tetapi ia membagi motif jalan kekuasaan atas dua macam, yaitu kekuasaan dengan motif kekejaman dan kekuasaan dengan konstitusional.

Kekuasaan dengan Motif Kekejaman

Machiavelli dalam pandangannya tentang model kekuasaan dengan motif kekejaman menjelaskannya dengan contoh kisah dari Agathocles, orang Sicilia (Machiavelli, 2019). Agathocles merupakan seorang yang berasal dari kalangan hirarki terendah dalam lapisan masyarakat dan termasuk seorang yang sangat miskin. Agathocles hanya seorang anak dari tukang pembuat tanah liat. Meskipun dengan latar belakang demikian, ia berhasil menjadi raja Syracuse. Keberhasilannya menjadi raja didukung oleh sifat keberanian dan fisik yang kuat meskipun berkepribadian seperti seorang penjahat. Sifat karakteristik tersebut menjadikannya selalu naik pangkat dan memimpin panglima pasukan. Sehingga ia berencana untuk menjadi seorang penguasa dan mempertahankan kekuasaannya dengan motif apapun tanpa peduli atas kecemasan orang lain terhadap tindakan yang ia lakukan.

Dalam proses strateginya untuk menjadi seorang penguasa, Agathocles mendapatkan persetujuan dari Hamilcar, orang Carthago yang sedang memimpin pasukan perangnya di Sicilia. Agathocles menyusun taktik licik untuk memperlancar dengan mengumpulkan rakyat dan senat Syracuse, dengan alibi membahas problematika yang menyangkut negara republik tersebut. Padahal tujuan sebenarnya adalah melancarkan rencana kejamnya untuk menjadi seorang dengan motif kekejaman. Dari perkumpulan tersebut, ia berhasil membunuh para rakyat dan senator dengan mempersiapkan para serdadu-serdadunya dibelakang layar sebagai eksekutor. Setelah semuanya mati, ia merebut dan memegang kendali kekuasaan dengan motif kekejamannya.

Penggalan cerita di atas yang dikemukakan oleh Machiavelli dalam *The Prince* menimbulkan anggapan-anggapan bagi sebagian orang bahwa cerita tersebut memang merupakan implementasi dari teori kontroversial Machiavelli. Padahal sebenarnya ketika tulisan Machiavelli dipahami lebih serius, justru ia menanggapi cerita di atas sebagai suatu tindakan yang berbahaya.

Menurut Machiavelli tindakan yang dilakukan oleh Agathocles untuk menjadi seorang penguasa adalah tindakan yang berani sekaligus berbahaya. Boleh saja Agathocles berhasil dalam perencanaannya menjadi penguasa, akan tetapi dibalik itu semua, konsekuensi yang muncul adalah jalan yang digunakannya bukan termasuk suatu kemuliaan. Cara tersebut hanyalah akan menjadikan ia berkuasa tapi tidak terhormat (Machiavelli, 2019).

Pandangan Machiavelli terhadap cerita Agathocles memberikan kesan kepada semua orang bahwa tidak selamanya ia berada dalam persepsi yang berkonotasi pada praktik taktik busuk kekuasaan. Meskipun teori kekuasaannya berfokus pada metode apa saja yang diaplikasikan demi meraih dan mempertahankan kekuasaan. Namun, Machiavelli juga mensyaratkan berbagai kualifikasi pada hal yang harus dimiliki oleh seorang penguasa dalam meraih kekuasaan.

Kekuasaan Konstitusional

Berbeda dengan tipe kekuasaan pertama yang menggunakan motif kekejaman, tetapi dalam hal ini Machiavelli tidak mengedepankan aspek bengis tersebut. Tipe kekuasaan yang kedua adalah kekuasaan yang dipimpin oleh seorang rakyat biasa yang menjadi penguasa atas persetujuan sesama rakyat. Bukan dengan motif kekejaman. Inilah yang disebut dengan kekuasaan konstitusional.

Menurut Machiavelli, kekuasaan konstitusional dapat diraih dengan metode yang berdasarkan nasib baik seseorang disebabkan oleh kepintarannya dalam memperoleh hati para rakyat dan kalangan bangsawan agar dapat dukungan (Machiavelli, 1991). Tidak dapat dipungkiri bahwa rakyat manapun pasti tidak menginginkan kekuasaan yang bernada dehumanis. Oleh sebab itu, untuk mencapai kekuasaan tidak lagi

menggunakan cara-cara yang brutal, melainkan dari kerjasama antara para rakyat dan golongan bangsawan untuk mengangkat siapa yang memiliki otoritas menjadi seorang penguasa.

Menjadi seorang penguasa dalam tatanan konsep kekuasaan konstitusional tidak menjadikan orang tersebut terbebas dari problematika penilaian. Machiavelli menekankan bahwa orang yang menjadi penguasa harus dilihat siapa pendukung dibalik itu semua. Hal ini ditegaskan oleh Machiavelli dalam *The Prince*:

“A man who becomes ruler through the help of the nobles will find it harder to maintain his power than one who becomes ruler through the help of the people, because he is surrounded by many men who consider that they are his equals, and therefore he cannot give them orders or deal with them as he would wish. On the other hand, a man who becomes ruler through popular support finds himself standing alone, having around him nobody or very few not disposed to obey him” (Machiavelli, 2019).

Machiavelli menyatakan bahwa seorang yang menjadi penguasa atas dasar dukungan bangsawan tidak lebih independen dari pada penguasa atas dasar dukungan rakyat. Peran seorang penguasa atas dasar dukungan golongan bangsawan selalu berada dibawah naungan wewenang bangsawan tersebut. Model penguasa seperti ini tidak jauh dari istilah pemimpin boneka yang sering diasosiasikan untuk pemimpin berwajah dua. Seakan-akan mereka memiliki dua panggung. Panggung depan (*front stage*) ketika berhadapan dengan rakyat dan panggung belakang (*back stage*) ketika berada dalam wilayah sutradaranya.

Sementara seorang penguasa atas dasar dukungan rakyat memiliki peran yang lebih bebas atau dengan kata lain tidak tunduk oleh wewenang para kaum bangsawan. Model penguasa seperti ini lebih memperhatikan nasib baik rakyat dan menghindari segala bentuk penindasan. Artinya, seorang penguasa hendaknya harus hidup bersama dengan rakyat dan memelihara hubungan harmonis dengan rakyat. Hal itu harus dilakukan karena rakyat lebih terbuka dalam keinginan mereka dibandingkan dengan golongan aristokrat yang hanya beretujuan demi kepentingan mereka sendiri. Oleh karena itu, seorang penguasa yang bijaksana harus mempertahankan persahabatannya dengan rakyat. Dengan demikian, rakyat akan setia (Machiavelli, 2019).

Analisis Dinamika Stabilitas Politik di Indonesia Dalam Pemikiran Politik Kekuasaan Machiavelli

Konsep kekuasaan yang ditawarkan oleh Machiavelli telah banyak mempengaruhi sekaligus dijadikan sumber rujukan oleh para politisi dunia, tak terkecuali di Indonesia. Terlebih lagi teori kekuasaan Machiavelli dalam dua buah karya monumentalnya *The Prince* dan *The Discourses* dapat dengan mudah dipelajari dan diimplementasikan. Sehingga hal ini berdampak pada dinamika stabilitas politik. Dalam konteks di Indonesia, suasana stabilitas politik selalu menjadi isu sejak zaman dulu hingga sekarang.

Dalam dinamika politik di Indonesia, pemikiran-pemikiran Machiavelli dapat dengan mudah ditemukan dan dianalisis dari berbagai peristiwa yang terjadi. Implikasinya adalah adanya sikap normalisasi dari praktik-praktik yang menghalalkan segala cara demi memperoleh kekuasaan. Misalnya dengan praktik *money politic* sebagai transaksi jual beli suara, politik identitas sebagai pancingan untuk para kaum fundamentalis, *black campaign* dengan isu SARA, menyewa *buzzer* dan seterusnya (Haboddin, 2017). Dari berbagai kasus tersebut nampaknya sudah menjadi rahasia umum kalau pemikiran Machiavelli diam-diam menjadi praktik politik di negara Indonesia. Signifikansi dari konsep kekuasaan Machiavelli oleh hampir semua pemimpin di ruang birokrasi secara terselubung menerapkannya.

Sejalan dengan konsep politik kekuasaan Machiavelli, upaya untuk mempertahankan kekuasaan seharusnya demi kepentingan rakyat dan dibangun atas dasar stabilitas politik meskipun hal tersebut dilakukan dengan kebijakan yang kontroversial (Fahrezy & Al Hamid, 2021). Kesarjanaan modern biasanya berpendapat bahwa minat pertama dan tujuan pokok pemikiran Machiavelli berangkat dari latar historis-sosialnya, yakni demi kebaikan rakyat Italia. Tidak ada alasan atau keharusan untuk menolak penilaian ini. Akan tetapi penolakan atau tuduhan yang ditujukan kepada pemikir Florentine ini lebih kepada konstruksi kerangka kerja teoritisnya serta kelemahan logikanya. Machiavelli mengikuti tradisi kuno dalam membedakan antara kerajaan dan tirani. Pertama, terkait dengan kerajaan merupakan manifestasi kekuasaan bagi kebaikan umum rakyat. Sedangkan yang kedua, tirani merupakan kekuasaan yang demi tujuan memenuhi kepentingan pribadi penguasa. Seorang penguasa yang baik adalah ia yang tujuannya bukan untuk kepentingan diri sendiri melainkan untuk kebaikan umum dan bukan untuk kepentingan pengganti-penggantinya melainkan demi tanah air yang menjadi milik semua orang (Henry J. Schmandt, 2002).

Demi tujuan yang baik, semua cara bisa dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Seorang penguasa tidak perlu peduli apakah tindakannya itu menyalahi aturan moral atau terdapat batasan etis yang telah dilanggar. Tidak terdapat kejahatan dalam politik adalah masalah kecil. Akan tetapi, yang terpenting adalah bahwa ia harus menggunakannya untuk tujuan yang benar, yaitu kebaikan umum dan bahwa ia mempunyai landasan yang masuk akal atas tindakan yang dilakukan serta cara-cara yang dipilih akan kondusif bagi pencapaian yang diinginkan (Henry J. Schmandt, 2002). Terkait dengan pandangan ini, Machiavelli memberikan contoh nampak jelas bahwa “tindakan yang tercela dapat dijustifikasi dengan efeknya, dan ketika

efek tersebut baik sebagaimana dalam kasus Romulus, ia selalu mengesahkan tindakan tersebut.” Romulus dikecam karena membunuh saudaranya Remus dengan alasan apa yang ia lakukan adalah untuk kebaikan umum dan bukan untuk memenuhi ambisi pribadinya” (Machiavelli, 1996).

Menurut hemat penulis, politik Machiavellian yang selama ini diasosiasikan sebagai suatu tindakan praktik politik yang oportunist, penuh tipu muslihat, licik, amoral dan ambisius disebabkan oleh lepasnya pembacaan konteks dari kondisi kompleksitas gagasan Machiavelli, khususnya dalam karya *The Prince* dan melupakan pembacaan *The Discourses*. Prinsip-prinsip kebrutalan Machiavelli dalam *The Prince* berangkat dari latar historis Florentine saat itu yang terancam invasi imperium-imperium besar. Dengan kata lain, cara-cara kejam yang dikehendaki Machiavelli dibangun dari kondisi yang *chaos* dan tetap memerlukan stabilitas politik demi kepentingan rakyat.

Jika kita hadapkan politik kekuasaan Machiavelli dengan kasus-kasus percaturan politik yang telah dan akan terjadi di Indonesia hendaknya harus dilihat dari tujuan yang dicapai. Jika hal tersebut dilaksanakan demi kepentingan rakyat dan kebaikan umum, atau dengan alasan kekhawatiran suatu kekuasaan akan jatuh ke tangan yang salah, maka hal tersebut sah untuk dilakukan meskipun melanggar regulasi moralitas yang telah disepakati.

Berdasarkan posisi di atas, tentu menjadi suatu dilema moralitas ketika seorang pemimpin harus mempertaruhkan reputasinya yang disebabkan oleh pelanggaran moralitas, demi kebaikan negara. Mengingat misi seorang pemimpin pasti memiliki keinginan untuk memperoleh kehormatan dan keagungan (Mohammad Maiwan, 2019).

Sebagaimana uraian di atas, timbul persoalan lain bagaimana seharusnya mengetahui langkah dari seorang penguasa apakah itu bertujuan baik atau sebaliknya. Karena banyak sekali seorang penguasa di zaman sekarang yang berjalan di atas kemunafikan. Seakan-akan retorikanya revolusioner, namun gerakannya reformis. Orasi dalam kampanyenya memberantas kemiskinan, namun realitanya menyengsarakan rakyat. Maka dari itu, persoalan-persoalan tersebut menjadi tugas utama bagi semua elemen masyarakat untuk pandai merefleksikan politik kekuasaan yang baik dalam dunia politik.

4. Kesimpulan

Machiavelli berpendapat bahwa kekuasaan dalam realitas politik harus terpisah dari konteks etika. Menurutnya, seorang penguasa memiliki wewenang untuk melakukan apapun, baik itu dengan cara kejam atau tidak selama tindakan tersebut demi mempertahankan kekuasaan dari ancaman yang akan mereduksi legitimasinya. Machiavelli juga menegaskan bahwa seorang penguasa harus selalu memperhatikan kepentingan rakyat bukan kepentingan pribadi maupun suatu golongan.

Penjelasan yang dikonsepsikan oleh Machiavelli tentang sikap seorang penguasa membawa pengaruh pada dinamika stabilitas politik. Politik kekuasaan yang dibangun atas dasar tujuan yang baik, yakni demi kepentingan rakyat dan kebaikan umum akan menimbulkan stabilitas politik yang baik. Sebaliknya jika kekuasaan tersebut dibangun atas kepentingan golongan tertentu, maka akan berdampak pada stabilitas yang kacau. Konsep kekuasaan yang ia tawarkan memberikan suatu model pemahaman bahwa Machiavelli membawa diskusi politik pada tatanan yang bersifat realistis dan tidak peduli pada pendekatan normatif. Meskipun demikian, pemikiran politik Machiavelli tetap memprioritaskan pada kepentingan rakyat.

5. Ucapan Terima Kasih

Dalam proses pengerjaan penelitian ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu menyelesaikan penelitian ini, khususnya kepada pihak program studi Akidah dan Filsafat Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu matakuliah filsafat politik yang telah membantu dalam banyak hal penyelesaian terkait penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Anugerah, B. (2021). Urgensi Pengelolaan Pendengung (Buzzer) Melalui Kebijakan Publik Guna Mendukung Stabilitas Politik di Indonesia. *Jurnal Kajian Lembaga Ketahanan Nasional Indonesia*, 8(3), 391–407.
- Atthahara, H. (2020). Perspektif Ideologi Dan Kekuasaan Dalam Pemikiran Machiavelli: Studi Kasus Pemilihan Umum Presiden 2019. *Jisipol*, Vol. 4 No.(April), 85–100.
- Azhar, M. (2016). *Gagasan Politik dan Strategi Mempertahankan Kekuasaan Ala Niccolo Machiavelli*. Rajawali Grafindo Persada.
- B. Russel. (2002). *Sejarah Filsafat Barat, terj. Sigit Jatmiko, et. al.* Pustaka Pelajar.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Cassirer, E. (1946). *The Myth of The State*. Yale Unniversity Press.

- Dannis, T. (1986). *Pemikiran-Pemikiran Politik*. Aksara Persada Indonesia.
- Fahrezy, A. F., & Al Hamid, R. (2021). Pemikiran Politik Niccolo Machiavelli: Studi Kasus Dinasti Umayyah. *Living Islam: Journal of Islamic Discourses*, 4(2), 143–164. <https://doi.org/10.14421/LIJID.V4I2.2866>
- Haboddin, M. (2017). *Memahami Kekuasaan Politik*. UB Press.
- Hardiman, F. B. (2011). *Pemikiran-pemikiran yang Membentuk Dunia Modern, Dari Machiavelli Sampai Nietzsche*. Erlangga.
- Henry J. Schmandt. (2002). *Filsafat Politik Kajian Historis dari Zaman Yunani Kuno, Terj., Ahmad Baidlowi*. Pustaka Pelajar.
- Machiavelli, N. (1996). *Discourses on Livy*. University of Chicago Press.
- Machiavelli, N. (2019). *The Prince, Second Edition, edited by Quentin Skinner and Russell Price*. Cambridge University Press.
- Mohammad Maiwan. (2019). Antara Virtue Dan Fortune; Suatu Dimensi Dalam Pemikiran Machiavelli. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 19(1), 39–61.
- Qomariyah, N. (2023). *Perspektif Ideologi dan Kekuasaan (Telaah Historis Pemikiran Niccolo Machiavelli)*. 6, 352–360.
- Rais, A. (1999). *Sukses dan Keajaiban Kekuasaan*. Pustaka Pelajar.
- Rapar, J. H. (1991). *Filsafat Politik Machiavelli*. Rajawali.
- Rapar, J. H. (2001). *Filsafat Politik Plato, Aristoteles, Agustinus, Machiavelli*. Raja Grafindo.
- Riggs, J. C. P. & R. E. (1994). *Kamus Analisa Politik*. Raja Grafindo.
- Roskin, M. G. (2017). *Political Science: An Introduction, Fourteenth Edition*. Pearson Education.
- Sanit, A. (1982). *Sistem Politik di Indonesia; Kestabilan Peta Kekuatan Politik dan Pembangunan*. Rajawali Press.
- Suhelmi, A. (2002). *Pemikiran Politik Barat*. Raja Grafindo